



## PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, UPAH MINIMUM REGIONAL, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI KAWASAN NON-SARBAGITA PROVINSI BALI

Jeremi Erick Fandy Yeimo<sup>1</sup> Anak Agung Ketut Ayuningsasi<sup>2</sup>

### Article history:

### Abstract

#### Keywords:

Original Local Government Revenue;  
Regional Minimum Wage;  
Economic Growth;  
Unemployment

The purpose of this study was to analyze the effect of original local government revenue (PAD), regional minimum wage (UMR), and economic growth simultaneously and partially on the unemployment rate in Non-Sarbagita Regions in Bali Province. The data used in this study is secondary data obtained from BPS Bali Province related to original local government revenue, regional minimum wage, economic growth, and unemployment rate. This study uses panel data, which is a combination of time-series data (2014-2020) and cross-section data (5 districts/cities in Bali Province) so that the total observations are 35 observations.. Based on the results of the analysis, it was found that the variables of original local government revenue, regional minimum wages, and economic growth had a significant effect on the unemployment rate in the Non-Sarbagita area, Bali Province. Partially, the original local government revenue variable has a positive and significant effect on the unemployment rate in the Non-Sarbagita Region, Bali Province, while the regional minimum wage and economic growth have a negative and significant impact on the unemployment rate in the Non-Sarbagita Region, Bali Province.

### Kata Kunci:

Pendapatan Asli Daerah;  
Upah Minimum Regional;  
Pertumbuhan Ekonomi;  
Pengangguran

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), upah minimum regional (UMR), dan pertumbuhan ekonomi secara simultan dan parsial terhadap tingkat pengangguran pada Kawasan Non Sarbagita di Provinsi Bali. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari BPS Provinsi Bali terkait pendapatan asli daerah, upah minimum regional, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran. Penelitian ini menggunakan data panel yaitu gabungan dari data *time series* (2014-2020) dan data *cross section* (5 kabupaten/kota di Provinsi Bali) sehingga total pengamatan yaitu 35 pengamatan. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa secara simultan variabel pendapatan asli daerah, upah minimum regional, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di kawasan Non Sarbagita Provinsi Bali. Secara parsial, variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kawasan Non Sarbagita Provinsi Bali, sedangkan upah minimum regional dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kawasan Non Sarbagita Provinsi Bali.

### Koresponding:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Udayana, Bali,  
Indonesia  
Email:  
[jerrydisco29@gmail.com](mailto:jerrydisco29@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Pengangguran dapat disebabkan oleh adanya ketimpangan jumlah angkatan kerja dengan ketersediaan lapangan kerja (Ningsih & Indrajaya, 2015). Maka dari itu, tantangan yang dihadapi saat ini adalah menyediakan lapangan pekerjaan yang baik dan dapat meningkatkan produktivitas agar dapat memperbaiki standar hidup serta menurunkan tingkat kemiskinan (Sarah & Manning, 2017). Todaro (2000) mendefinisikan pengangguran sebagai penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau menyiapkan usaha baru, atau sebagai penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, dan bisa juga sudah diterima bekerja namun belum mulai bekerja. Pengangguran umumnya disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja dimana jumlah permintaan lebih banyak dibandingkan jumlah penawaran.

Penelitian ini dilakukan pada kawasan Non Sarbagita Provinsi Bali karena bukan merupakan kawasan yang diprioritaskan oleh pemerintah sehingga jarang menjadi bahan penelitian. Adapun beberapa faktor terkait pengangguran yang akan dikaji yaitu pendapatan asli daerah, upah minimum regional, dan pertumbuhan ekonomi. Pendapatan asli daerah merupakan indikator yang menggambarkan kemandirian daerah dalam meningkatkan sumber pendapatan daerah. Pendapatan daerah yang tinggi menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mandiri dalam menentukan keputusan dan kebijakan untuk pembangunan daerah. Santosa (2013) menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki hubungan negatif signifikan terhadap pengangguran, karena semakin tinggi pendapatan asli daerah maka semakin baik pengelolaan keuangan daerah, kemudian daerah dapat semakin produktif dan akan menyerap tenaga kerja lebih banyak.

Permasalahan mendasar yang sering terjadi dalam ketenagakerjaan adalah upah minimum regional yang rendah yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada pengangguran. Hal ini dikarenakan peningkatan tenaga kerja baru lebih banyak dibandingkan lapangan pekerjaan yang tersedia tiap tahun (Ryan dkk, 2017). Menurut Seran (2017), tenaga kerja cenderung memilih untuk menganggur karena tingkat upah yang ditetapkan rendah. Kaufman dan Hotchkiss (2000) menyebutkan bahwa tujuan adanya kebijakan upah minimum adalah agar dapat memenuhi standar hidup pekerja. Dalam teori klasik dijelaskan bahwa untuk mengatasi pengangguran dapat dilakukan dengan menurunkan tingkat upah. Hal ini karena jika upah turun maka permintaan tenaga kerja meningkat, sehingga akan dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak. Penelitian yang dilakukan oleh Said (2017) menemukan bahwa upah minimum regional berpengaruh negatif signifikan terhadap pengangguran.

Pertumbuhan ekonomi merupakan permasalahan ekonomi makro dalam jangka panjang (Arka & Yasa, 2015). Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai parameter yang menunjukkan perkembangan ekonomi dalam menghasilkan barang dan jasa, serta sebagai indikator untuk mengukur keadaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi umumnya berkaitan dengan peningkatan produksi barang dan jasa oleh masyarakat (Dewi & Purbadharmaja, 2013). Pertumbuhan ekonomi daerah yang meningkat dapat dilihat dari nilai PDRB yang mengalami tren positif (meningkat) dari tahun sebelumnya. PDRB adalah nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh daerah. Indikator ini berperan penting bagi daerah karena dapat digunakan untuk melihat pencapaian pembangunan daerah dan sebagai pertimbangan rencana pembangunan pada masa mendatang (Fitriadi dkk, 2014).

Menurut informasi yang dihimpun dari BPS Provinsi Bali, diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi di Kawasan Non Sarbagita mengalami penurunan drastis pada tahun 2020, yang disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19. Menurut teori klasik, peningkatan pertumbuhan ekonomi akan dapat menurunkan tingkat pengangguran di suatu daerah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa produksi yang dilakukan juga meningkat sehingga dalam prosesnya dapat menyerap tenaga

kerja, karena peningkatan output produksi memerlukan tambahan tenaga kerja. Adanya penyerapan tenaga kerja kemudian akan dapat menurunkan tingkat pengangguran. Peningkatan output menunjukkan pendapatan perkapita juga meningkat, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan akan menurunkan tingkat pengangguran (Risnawati, 2019). Pertumbuhan ekonomi memberikan peluang pada peningkatan produksi dan penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak (Mentari dan Mahaendra Yasa, 2016).

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penelitian ini membahas beberapa faktor yang mempengaruhi pengangguran di kawasan Non Sarbagita diantaranya pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan upah minimum regional. Kawasan Non Sarbagita dipilih sebagai wilayah penelitian karena bukan merupakan kawasan metropolitan yang menjadi pusat perhatian dari pemerintahan Provinsi Bali yang menyebabkan terjadinya ketimpangan dengan kawasan Sarbagita.

Berdasarkan permasalahan, teori, dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.  $H_1$  : Pendapatan asli daerah, upah minimum regional, dan pertumbuhan ekonomi secara simultan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di kawasan Non Sarbagita Provinsi Bali.  $H_2$  : Pendapatan asli daerah, upah minimum regional, dan pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran di kawasan Non Sarbagita Provinsi Bali.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), upah minimum regional (UMR), dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di kawasan Non Sarbagita Provinsi Bali. Lokasi penelitian dilakukan kawasan Non Sarbagita Provinsi Bali yaitu Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Karangasem dengan menggunakan data-data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistika dan dinas yang terkait dengan obyek penelitian. Adapun variabel yang menjadi obyek penelitian yaitu pendapatan asli daerah, upah minimum regional, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Penelitian ini menggunakan data panel yang merupakan penggabungan data *time series* dan *cross section* terkait variabel tingkat pengangguran, PAD, UMR, dan pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu tujuh tahun, yaitu tahun 2014-2020 pada 5 kabupaten/kota di Provinsi Bali, sehingga jumlah pengamatan =  $7 \times 5 = 35$  pengamatan. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda, dengan persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

Y = Tingkat Pengangguran

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Koefisien Regresi

$X_1$  = PAD

$X_2$  = UMR

$X_3$  = Pertumbuhan Ekonomi

$\varepsilon$  = Error (kesalahan pengganggu)

Sebelumnya terlebih dahulu dilakukan analisis data panel, kemudian dilanjutkan dengan uji asumsi klasik sebagai syarat melakukan uji regresi linier berganda, dilanjutkan dengan menginterpretasikan koefisien determinasi, uji kelayakan model, dan uji hipotesis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1**  
**Tingkat Pengangguran di Wilayah Non Sarbagita Provinsi Bali**

No	Kab/Kota	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jembrana	2,95	1,59	1,59	0,67	1,38	1,42	4,52
2	Klungkung	1,94	1,39	1,39	0,92	1,41	1,54	5,42
3	Bangli	0,67	1,72	1,72	0,48	0,80	0,72	1,86
4	Karangasem	2,06	2,15	2,15	0,72	0,99	0,60	2,42
5	Buleleng	2,74	2,04	2,04	2,41	1,84	3,02	5,19
Non Sarbagita		2.07	1,78	1,78	1,04	1,28	1,46	3,88

Sumber: BPS, 2021

Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa tingkat pengangguran di kawasan Non Sarbagita pada periode tahun 2014-2020 mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Terdapat perbedaan tingkat pengangguran yang dialami antar kabupaten, hal ini dikarenakan penduduk asli daerah ini bekerja di luar daerah, terutama pada wilayah Sarbagita yang menjadi sentra ekonomi Bali. Selain itu, masyarakat di desa cenderung bekerja sebagai petani ataupun nelayan sehingga tetap memiliki pendapatan meski bekerja pada sektor non formal. Selain itu, lonjakan tingkat pengangguran yang tinggi pada tahun 2020 disebabkan oleh adanya pandemi, sehingga terjadi penurunan pendapatan daerah yang cukup signifikan, tidak sedikit karyawan dirumahkan, dan juga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Kendati demikian, Kabupaten Bangli dapat menjaga tingkat pengangguran pada angka 1,86 persen yang mana angka ini paling kecil dibandingkan dengan kabupaten lainnya seperti Kabupaten Klungkung yang mengalami lonjakan pada angka 5,42 persen. Hal ini disebabkan oleh Kabupaten Bangli tidak bergantung pada sektor pariwisata, sehingga ketika terjadi pandemi ini tidak terjadi lonjakan pengangguran di kabupaten ini.

**Tabel 2.**  
**Pendapatan Asli Daerah di Kawasan Non Sarbagita Provinsi Bali**

Kabupaten	Pendapatan Asli Daerah di Kawasan Non Sarbagita (juta rupiah)						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jembrana	89.349	98.159	114.533	121.342	126.477	133.698	141.545
Klungkung	98.837	120.033	134.772	153.233	186.974	225.063	248.625
Bangli	76.553	87.801	104.829	104.592	122.686	127.040	165.275
Karangasem	239.425	243.125	232.643	198.663	200.362	233.013	259.456
Buleleng	219.682	293.038	282.113	455.195	335.555	365.595	402.217

Sumber : BPS, 2021

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa total pendapatan asli daerah pada setiap kabupaten/kota sangat bervariasi. Kabupaten Jembrana dan Bangli merupakan 2 (dua) kabupaten yang memiliki PAD terendah di kawasan Non Sarbagita Provinsi Bali, sedangkan Kabupaten Buleleng merupakan kabupaten dengan pendapatan asli daerah terbanyak. Terjadinya perbedaan pendapatan asli daerah yang diterima oleh kabupaten dikarenakan oleh perbedaan potensi yang dapat dikembangkan oleh kabupaten dan juga luas wilayahnya. Seperti halnya Kabupaten Buleleng yang memiliki wilayah terluas dan juga potensi sumber daya alam yang dimiliki yang dapat digunakan untuk menanam

tanaman rempah, kopi, dan juga memiliki daya tarik wisata menyebabkan daerah ini dapat berkembang lebih cepat dibandingkan kabupaten lainnya di kawasan Sarbagita. Demikian pula pada Kabupaten Bangli yang memiliki wilayah lebih sempit dan potensi pengembangan wilayah yang terbatas menyebabkan pendapatan asli daerah kabupaten ini paling sedikit.

**Tabel 3.**  
**Upah Minimum Regional di Kawasan Non Sarbagita Provinsi Bali 2014-2020**

Kabupaten	Upah Minimum Regional di Kawasan Non Sarbagita (rupiah)						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jembrana	1.542.600	1.662.500	1.662.500	2.006.617	2.181.393	2.356.559	2.557.102
Klungkung	1.545.000	1.650.000	1.839.750	1.991.529	2.164.992	2.338.840	2.538.000
Bangli	1.542.600	1.622.000	1.808.530	1.957.734	2.128.253	2.299.152	2.484.810
Karangasem	1.542.600	1.700.000	1.839.500	2.051.879	2.180.000	2.355.054	2.555.469
Buleleng	1.542.600	1.650.000	1.839.750	1.991.529	2.165.000	2.338.850	2.538.000

Sumber: BPS, 2021

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa upah minimum regional di kawasan Non Sarbagita mengalami peningkatan tiap tahunnya. Adapun perbedaan upah minimum regional di tiap daerah yang disebabkan oleh banyak faktor seperti pendapatan daerah tiap kabupaten yang diperoleh berbeda karena pendapatan yang berbeda. Upah minimum di Kabupaten Buleleng tertinggi dikarenakan kabupaten ini tidak hanya menjadi daerah wisata, namun juga memiliki sektor pertanian sehingga pertumbuhan ekonominya cenderung stabil. Kabupaten Bangli memiliki tingkat upah minimum yang paling rendah di Kawasan Sarbagita karena bukan merupakan daerah wisata sehingga pendapatan yang diterima oleh masyarakat cenderung sedikit.

**Tabel 4.**  
**Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Non Sarbagita Provinsi Bali**

Kabupaten	Pertumbuhan Ekonomi (persen)						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jembrana	6,05	6,19	5,96	5,28	5,59	5,56	-4,96
Klungkung	5,98	6,11	6,28	5,32	5,48	5,42	-6,35
Bangli	5,83	6,16	6,24	5,31	5,48	5,46	-4,10
Karangasem	6,01	6,00	5,92	5,06	5,44	5,50	-4,45
Buleleng	6,96	6,07	6,02	5,38	5,60	5,53	-5,76

Sumber: BPS, 2021

Berdasarkan Tabel 4, terlihat bahwa fluktuasi pertumbuhan ekonomi dari tahun 2014-2020 cenderung berfluktuasi menurun. Perkembangan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014-2019 masih positif meskipun terus mengalami penurunan, namun pada tahun 2020, semua kabupaten di wilayah Non Sarbagita mengalami pertumbuhan ekonomi negatif sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan pariwisata sehingga pendapatan daerah berkurang. Meningkatnya angka pengangguran karena banyaknya karyawan yang dirumahkan ataupun mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Oleh karena banyaknya masyarakat yang dulunya bekerja di luar wilayah kembali pulang ke kampung halaman karena ekonomi yang semakin menurun menyebabkan melonjaknya angka pengangguran sehingga pertumbuhan ekonomi turut mengalami penurunan. Kendati demikian, pemerintah daerah terus berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya masing-masing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui data yang digunakan dalam model regresi memiliki distribusi normal atau tidak, yang dilakukan dengan menggunakan uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Hasil pengujian diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* yang dihasilkan adalah sebesar 0,978. Nilai yang dihasilkan ini lebih besar dari signifikan 0,05 sehingga dapat disimpulkan seluruh variabel dalam model persamaan regresi penelitian ini sudah berdistribusi secara normal.

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mendeteksi adanya korelasi antar variabel bebas atau tidak pada model yang diteliti, dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Hasil pengujian diperoleh bahwa semua variabel independen yang digunakan memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen.

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui adanya ketidaksamaan varian dari residual semua pengamatan pada model regresi, yang dilakukan dengan Uji Park. Hasil pengujian dalam penelitian ini diketahui bahwa tingkat signifikansi ketiga variabel lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan pada penelitian ini tidak mengandung gejala heteroskedastisitas.

Berdasarkan pengujian diperoleh nilai F hitung sebesar 21,267 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ , ini berarti model yang digunakan pada penelitian ini layak untuk digunakan sebagai alat analisis untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Berdasarkan nilai koefisien determinasi, nilai  $R^2$  sebesar 0,673 yang berarti bahwa 67,3 persen variasi dari tingkat pengangguran (Y) dapat dijelaskan oleh variabel pendapatan asli daerah ( $X_1$ ), upah minimum regional ( $X_2$ ) dan pertumbuhan ekonomi ( $X_3$ ). Sisanya sebesar 32,7 persen dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

**Tabel 6.**  
**Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
(Constant)	46.016	13.959		3.297	.002
PAD	4.918E-12	.000	.395	3.615	.001
UMR	-3.030	.959	-.440	-3.158	.004
Pertumbuhan Ekonomi	-.268	.041	-.879	-6.491	.000

Sumber : Data Penelitian, 2021

Berdasarkan Tabel 6, dapat disusun persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = 46,016 + 0,0000000000004918X_1 - 3,030X_2 - 0,268X_3$$

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai *Coefficients Beta* sebesar 0,0000000000004918 dengan sig.  $0,001 < 0,05$  menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kawasan Non Sarbagita Provinsi Bali. Menurut teori Kuznet, setiap terjadinya peningkatan pendapatan akan diiringi oleh peningkatan kesenjangan dalam jangka pendek. Hubungan positif dan signifikan antara variabel pendapatan asli daerah terhadap tingkat pengangguran yang diperoleh dalam penelitian ini, karena pendapatan asli daerah yang

dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat tidak langsung dipergunakan untuk mengurangi tingkat pengangguran, melainkan pengalokasiannya lebih diarahkan kepada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan pendidikan, kesehatan, dan tunjangan lainnya.

Peningkatan pendapatan asli daerah pada kawasan Non Sarbagita di Provinsi Bali dalam penelitian ini menunjukkan pendapatan asli daerah belum dikelola dengan baik dan juga pendistribusian potensi daerah masing-masing belum maksimal, sehingga masih banyak masyarakat yang belum sejahtera dan masih banyaknya pengangguran. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Adriani & Mahaendra Yasa (2015), yang pada hasil penelitiannya juga didapat hasil bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran.

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai *Coefficients Beta* sebesar -3,030 dengan sig. 0,04 < 0,05 menunjukkan upah minimum regional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kawasan Non Sarbagita Provinsi Bali. Lestari (2018) menyebutkan bahwa upah minimum merupakan sebuah kontroversi, bagi yang mendukung kebijakan tersebut mengemukakan bahwa upah minimum diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pekerja agar sampai pada tingkat pendapatan "*living wage*", yang berarti bahwa orang yang bekerja akan mendapatkan pendapatan yang layak untuk hidupnya.

Upah minimum dapat mencegah pekerja dalam pasar monopoli dari eksploitasi tenaga kerja terutama yang *low skilled*. Upah minimum dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mengurangi konsekuensi pengangguran seperti yang diperkirakan teori ekonomi konvensional (Kusnaini, 1998). Upah merupakan unsur terpenting yang berpengaruh terhadap kehidupan pekerja karena upah menjadi sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya baik berupa sandang, pangan, perumahan maupun kebutuhan lain. Jika upah yang ditetapkan pada suatu daerah terlalu rendah, maka akan berakibat pada tingginya tingkat pengangguran yang terjadi pada daerah tersebut. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mansur, dkk (2014) yang menemukan bahwa tingkat upah minimum berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran.

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai *Coefficients Beta* sebesar -0,268 dengan sig. 0,000 < 0,05 menunjukkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di Kawasan Non Sarbagita Provinsi Bali. Hal ini mengindikasikan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka akan berdampak pada pengurangan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang terus meningkat dapat menggambarkan bahwa perekonomian daerah tersebut berkembang dengan baik, dalam hal ini berarti masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan baik melalui pendapatan yang diterima dari pekerjaan yang dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menyebabkan pengangguran di daerah tersebut menurun (Prawira, 2018). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurcholli (2014) dan Rofik, dkk (2018) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berdampak negatif signifikan terhadap pengangguran.

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan bahwa pendapatan asli daerah, upah minimum regional, dan pertumbuhan ekonomi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di kawasan Non Sarbagita Provinsi Bali. Secara parsial, variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan

terhadap tingkat pengangguran di kawasan Non Sarbagita Provinsi Bali, sedangkan upah minimum regional dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kawasan Non Sarbagita Provinsi Bali.

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, maka dapat diajukan saran sebagai berikut. Pentingnya pengalokasian dana yang tepat dari pendapatan asli daerah dalam perannya mengurangi tingkat pengangguran. Pendapatan asli daerah pada kawasan Non Sarbagita di Provinsi Bali ternyata belum dapat mengurangi tingkat pengangguran, bila belum terlaksananya pengalokasian yang tepat seperti pengadaan pelatihan bagi masyarakat untuk meningkatkan *skill* dan pengetahuan. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran, maka dari itu disarankan pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara menciptakan dan menggunakan sumber-sumber ekonomi dengan baik. Pemerintah diharapkan menciptakan lapangan kerja dan menjalin kerja sama dengan pihak swasta perekrutan tenaga kerja lokal sehingga tingkat pengangguran akan menurun, melalui program magang dan diklat bagi calon tenaga kerja.

## REFERENSI

- Adriani, N. L. G. C., & Mahaendra Yasa, I. N. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Tingkat Pengangguran Melalui Belanja Tidak Langsung Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(11), 1328-1356
- Arka, S., & Yasa, I. K. O. A. (2015). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan antardaerah terhadap kesejahteraan masyarakat provinsi bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 8(1), 63-71
- Dewi, S. L. dan Purbadharmaja, I. B. P. (2013). Pengaruh PAD, PMA, dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Balil. *Jurnal Ekonomi*, 2(11), 492- 546
- Fitriadi, F., Rochaida, E., & Taufik, M. (2014). Pengaruh Investasi Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 7(2), 90-101
- Kaufman, Bruce E dan Julie L. Hotchkiss. (1999). *Ekonomi Pasar Tenaga Kerja*. Yogyakarta: BPFE UGM
- Kusnaini, D. (1998). *Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja serta Upah: Teori Serta Beberapa Potretnya di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta
- Lestari, D. (2018). Analisis Pengaruh Inflasi, Upah Minimum Regional, PDRB, dan Nilai Tukar Terhadap Pengangguran di Indonesia pada Periode 2004-2013. *Jurnal Online Universitas Islam Indonesia*
- Mansur, Nirmala; Daisy Engka; dan Steeva Tumangkeng. (2014). Analisis Upah Terhadap Penganangguran Di Kota Manado Tahun 2003-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol 14 No 2
- Mentari, N. W. dan Mahaendra Yasa, I. N. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Upah Terhadap Tingkat Pengangguran Melalui Jumlah Investasi di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 5(7), 778-798
- Ningsih, N. M. C., & Indrajaya, I. G. B. (2015). Pengaruh modal dan tingkat upah terhadap nilai produksi serta penyerapan tenaga kerja pada industri kerajinan perak. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 8(1), 83-91.
- Nurcholis, M. (2014). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2014. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 48-57
- Prawira, S. (2018). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, dan tingkat pendidikan terhadap pengangguran terbuka di Indonesia. *Jurnal Ecogen*, 1(1), 162-168
- Risnawati, R., (2019). Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Barat. *CESJ: Center Of Economic Students Journal*, 2(3), hal. 135-143
- Rofik, M., Lestari, N. P., & Septianda, R. (2018). Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Tingkat Pengangguran di Kalimantan Barat. *Jurnal Inovasi Ekonomi*, 3(02). 45-52
- Ryan Z, R. Achmad, Nanik Istiyani dan Anifatul Hanim. (2017). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Angkatan Kerja dan Upah Minimum Regional Terhadap Pengangguran Terdidik di Jawa Timur. *E-journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 4(2), 187-191
- Said, N. R. (2017). Pengaruh Upah Minimum Regional, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran di Kota Makassar. *Doctoral dissertation*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar



- Santosa, B. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Daerah Terhadap Pertumbuhan, Pengangguran Dan Kemiskinan 33 Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Keuangan & Bisnis Program Studi Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Harapan*, 5(2), 130-143.
- Sarah Xue Dong and Chris Manning. (2017). Labour - Market Developments at a Time of Heightened Uncertainty. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. 53:1, pp. 1 – 25
- Seran, S. (2017). Hubungan Antara Pendidikan, Pengangguran, Dan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 10(1), 59-71
- Todaro, Michael P. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga